



BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2023

Jl. Lintas Jambi-Muara Sabak No. 14 Kel.Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat

Telephone : 082280817536

e-mail : bnnkntanjabtimgmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan berkahnya kepada kita semua sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 Pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Keberhasilan dan kesuksesan dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi serta kerja sama Pemerintah Daerah, Dinas Instansi terkait, Masyarakat dan Organisasi dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Sehubungan hal tersebut diatas perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Yth. Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dana kegiatan untuk Tahun 2023 pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Semua pihak yang telah membantu kami sehingga kegiatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat berjalan lancar dan sukses.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan-kekurangan sehingga kritik dan saran positif yang sangat membangun dapat menjadi masukan bagi kami di kemudian hari.

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**


ANIK MARETNOSARI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi masalah yang kompleks dan multidimensional, serta fakta perkembangannya telah menunjukkan kondisi yang semakin memprihatinkan dan telah menjadikannya ancaman serius terhadap generasi muda, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa dan dalam jangka panjang berpotensi besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, sehingga peredaran gelap narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan serius (*serious crime*).

Dewasa ini, berbagai metode diciptakan dan dikembangkan oleh jaringan sindikat narkoba untuk mempertahankan kesinambungan pasar atau konsumen, salah satunya melalui modifikasi zat Narkoba untuk menghindari jerat hukum. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jenis Narkotika Jenis Baru *New Psychoactive Substances* (NPS) namun pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya untuk menanggulangi maraknya narkotika jenis baru dengan mengeluarkan permenkes yang merubah golongan narkotika. Dari awal Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 sampai dengan saat ini (Permenkes No 50 tahun 2018) tentang perubahan penggolongan narkotika.

Selain permasalahan peredaran jenis narkotika baru, penyalahgunaan narkotika juga sudah menyasar ke berbagai kalangan dan wilayah bahkan sampai ke desa-desa karena dianggap desa menjadi wilayah strategis untuk jalur penyelundupan dan penyebaran penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, maka desa harus menjadi garda terdepan untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menyikapi permasalahan tersebut, Kepala BNN RI mengeluarkan kebijakan tentang program Desa Bersinar melalui Surat Edaran Kepala BNN RI Nomor :

SE/89/XII/DE/PC.00/2018/BNN tanggal 4 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba.

Mengatasi permasalahan narkoba bukan hanya tanggungjawab BNN saja tetapi juga tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam rangka penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan kepada seluruh Penegak Hukum, Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional terkait P4GN dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018. Untuk Tanjung Jabung Timur, dalam upaya mengatasi permasalahan Narkoba, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang bertugas melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), untuk lebih agresif dalam menangani permasalahan narkoba khususnya di wilayah Tanjung Jabung Timur melalui strategi *demand reduction*, yaitu dengan tindakan preventif guna memberikan kekebalan kepada masyarakat agar mereka imun terhadap penyalahgunaan narkoba, dan strategi *supply reduction*, melalui penegakan hukum yang tegas dan terukur agar sindikat narkoba jera.

Untuk mewujudkan langkah-langkah tersebut, diperlukan suatu perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang terencana dengan baik dan akuntabel disertai penjadwalan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan melalui Rencana Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) BNNK Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-066.01.2.419203/2023 tanggal 30 November 2022.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan rencana kerja BNNK Tanjung Jabung Timur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya rencana kerja ini adalah untuk menyatukan pola pikir dan tindakan dalam pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

D. RUANG LINGKUP

Rencana program dan kegiatan ini meliputi rencana kegiatan dan anggaran BNNK Tanjung Jabung Timur yang akan dilaksanakan baik berdasarkan DIPA BNNK Tanjung Jabung Timur maupun kegiatan Non DIPA Tahun Anggaran 2023.

Adapun Sistematika Rencana Program dan Kegiatan ini sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. PROGRAM DAN KEGIATAN
- III. KEGIATAN DAN ANGGARAN
- IV. PENUTUP

BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada Subbag Umum dalam rangka mendukung layanan operasional BNNK Tanjung Jabung Timur. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Subbag Umum

1.1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan terdiri dari 2 komponen kegiatan yaitu :

1.1.1. Layanan perkantoran dengan volume 12 layanan direalisasikan dalam Komponen Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran melalui fungsi administrasi kegiatan, yaitu pembayaran honorarium tim pengelola keuangan serta penyampaian SPM ke KPPN. Penggunaan anggaran dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan, sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi pada laporan keuangan Ke Kanwil, Ke KPPN dan ke KPKNL agar diperoleh laporan keuangan yang akurat dan akuntabel.

Komponen Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dilaksanakan secara swakelola.

Penerima manfaat adalah pengelola keuangan BNNK Tanjung Jabung Timur. Adapun waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut :

Komponen/Sub Komponen	Waktu Pelaksanaan
➤ Administrasi Kegiatan	Januari s/d Desember 2023
➤ Penyampaian SPM ke KPPN	Januari s/d Desember 2023
➤ Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke KPKNL	Januari s/d Desember 2023

1.1.2. Layanan Manajemen Keuangan dengan volume 1 dokumen direalisasikan dalam Komponen Kegiatan penyusunan laporan keuangan unit vertikal yaitu Rekonsiliasi dan Penelaahan Data Keuangan adalah aktivitas yang difungsikan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan satu kali dalam setahun. Penyelenggara dari Kegiatan ini adalah BNN Provinsi dengan mengundang para operator satker BNNP dan BNNK. Dalam tahapan ini, dilaksanakan proses sinkronisasi dan rekonsiliasi data capaian kinerja sehingga laporan yang disusun akuntabel dan handal dan kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola. Waktu pelaksanaan adalah bulan Januari atau Februari 2023 (berdasarkan undangan dari BNN Provinsi).

➤ Kegiatan Rekonsiliasi Keuangan Unaudited

Rekonsiliasi Keuangan Unaudited adalah aktivitas yang difungsikan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan semester II tahun anggaran sebelumnya yang dilaksanakan satu kali dalam setahun. Penyelenggara dari Kegiatan ini adalah BNN Provinsi dengan mengundang para operator satker BNNP dan BNNK. Dalam tahapan ini, dilaksanakan proses sinkronisasi dan rekonsiliasi data capaian kinerja sehingga laporan yang disusun akuntabel dan handal.

Kegiatan Rekonsiliasi Keuangan Unaudited dilaksanakan secara swakelola dan dilaksanakan pada bulan Januari 2023 (berdasarkan undangan BNN Provinsi).

Adapun penerima manfaat kegiatan ini adalah Pegawai BNNK Tanjung Jabung Timur sejumlah 2 (Dua) orang yang mendapatkan tugas sebagai operator SIMAK, Persediaan dan SAIBA.

➤ Kegiatan Rekonsiliasi dan Penelaahan Data Keuangan Semester I.

Rekonsiliasi dan Penelaahan Keuangan Semester I adalah aktivitas yang difungsikan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan I tahun anggaran berjalan yang dilaksanakan satu kali dalam setahun. Penyelenggara dari Kegiatan ini adalah BNN Provinsi dengan mengundang para operator satker BNNP dan BNNK. Dalam tahapan ini, dilaksanakan proses sinkronisasi dan rekonsiliasi data capaian kinerja sehingga laporan yang disusun akuntabel dan handal.

Kegiatan Rekonsiliasi dan penelaahan Keuangan Semester I dilaksanakan secara swakelola dan dilaksanakan pada bulan Juli 2023 (berdasarkan undangan BNN Provinsi).

Adapun penerima manfaat kegiatan ini adalah Pegawai BNNK Tanjung Jabung Timur sejumlah 3 (tiga) orang yang mendapatkan tugas sebagai operator SIMAK, Persediaan dan SAIBA.

- Kegiatan Penyusunan Laporan PNBPN Semester I dan Semester II.

Penyusunan Laporan PNBPN Semester I dan Semester II adalah aktivitas yang difungsikan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilaksanakan dua kali dalam setahun. Penyelenggara dari Kegiatan ini adalah BNN Provinsi dengan mengundang para operator satker BNNP dan BNNK. Dalam tahapan ini, dilaksanakan proses sinkronisasi dan rekonsiliasi data capaian kinerja sehingga laporan yang disusun akuntabel dan handal dan kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola.

Waktu pelaksanaan adalah bulan Januari dan Desember 2023 (berdasarkan undangan dari BNN Provinsi).

1.2. Pengembangan Organisasi, Tatalaksana dan Sumber Daya Manusia

Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana dan Sumber Daya Manusia terdiri dari 1 komponen kegiatan yaitu Layanan Manajemen SDM Internal dengan sub komponen kegiatan sebagai berikut :

➤ **Pembinaan Kepegawaian**

Komponen Pembinaan Kepegawaian adalah aktivitas yang difungsikan untuk meningkatkan kualitas SDM di BNNK Tanjung Jabung Timur melalui pembinaan rohani dan mental pegawai serta dengan memperingati hari-hari besar Keagamaan.

Komponen Pembinaan Kepegawaian dilaksanakan secara Swakelola.

➤ **Pelayanan Kesehatan Pegawai**

Komponen Pelayanan Kesehatan Pegawai adalah aktivitas yang difungsikan untuk meningkatkan kualitas SDM di BNNK Tanjung Jabung Timur melalui pembinaan jasmani pegawai dan pelayanan kesehatan pegawai.

Komponen Pelayanan Kesehatan Pegawai dilaksanakan secara Swakelola.

Adapun waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut :

Komponen/Sub Komponen	Waktu Pelaksanaan
A. Pembinaan Jasmami Pegawai BNN	Maret dan Oktober 2023
B. Pelayanan Kesehatan Pegawai	Februari s/d April, Juni, Agustus dan November 2023

1.3. Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN

Kegiatan penyusunan dan pengembangan rencana program dan anggaran BNN ini direalisasikan dalam 2 dokumen yaitu:

1.3.1 Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Layanan perencanaan dan penganggaran yang direalisasikan dalam 2 komponen kegiatan yaitu:

➤ **Perencanaan Kinerja Unit Vertikal**

Komponen Perencanaan kinerja unit vertikal adalah aktivitas yang difungsikan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kinerja unit vertikal terkait rencana kinerja pada tahun 2023.

Komponen Perencanaan kinerja unit vertikal dilaksanakan secara swakelola.

➤ **Penganggaran Unit Vertikal**

Komponen Penganggaran unit vertikal adalah aktivitas yang difungsikan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi RKA pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran serta koordinasi penyelarasan anggaran yang dituangkan dalam draft RAB. Dalam tahapan ini, dilaksanakan rapat penyusunan RKA-K/L mulai dari tingkat internal BNNK dan Wilayah. Sinkronisasi dan rekonsiliasi data capaian kinerja sehingga laporan yang disusun akuntabel dan handal.

Komponen Penganggaran unit vertikal dilaksanakan secara kombinasi antara swakelola dan kontraktual.

Adapun waktu pelaksanaan layanan perencanaan adalah sebagai berikut :

Komponen/Sub Komponen	Waktu Pelaksanaan
➤ Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kinerja BNNK/Kota	Maret 2023
➤ Koordinasi dan sinkronisasi RKA pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran	Maret 2023
➤ Koordinasi penyelarasan anggaran	Maret 2023

1.3.2 Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Layanan pemantauan dan evaluasi direalisasikan dalam 1 komponen kegiatan, yaitu :

- Pemantauan dan pelaporan kinerja unit vertikal

Komponen pemantauan dan pelaporan kinerja unit vertikal adalah aktivitas yang difungsikan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi data laporan kinerja dan anggaran serta koordinasi dan sinkronisasi data laporan RAN P4GN wilayah dan menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut. Dalam tahapan ini, dilaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan melaksanakan rapat dengan mengundang beberapa orang peserta dari OPD setempat. Komponen pemantauan dan pelaporan kinerja unit vertikal dilaksanakan secara swakelola.

Adapun waktu pelaksanaan Layanan pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut :

Komponen/Sub Komponen	Waktu Pelaksanaan
➤ Koordinasi dan sinkronisasi data laporan kinerja dan anggaran	Juni 2023
➤ Koordinasi dan sinkronisasi data laporan RAN P4GN wilayah	Februari 2023

1.4 Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

a. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang direalisasikan dalam bentuk Layanan Dukungan Manajemen Internal sebanyak 14 layanan sebagai berikut :

1.4.1. Layanan BMN

Layanan BMN direalisasikan sebanyak 1 layanan dalam komponen pengelolaan BMN unit vertikal dengan sub komponen kegiatan penghapusan BMN.

Komponen pengelolaan BMN unit vertikal adalah aktivitas yang difungsikan untuk penghapusan BMN yang dianggap perlu untuk dilakukan penghapusan yang mana sebelumnya dengan melakukan koordinasi atau rekonsiliasi dengan pihak KPKNL atau Kanwil.

Komponen pengelolaan BMN unit vertikal dilaksanakan secara swakelola.

Adapun waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut :

Komponen/Sub Komponen	Waktu Pelaksanaan
➤ Penghapusan BMN	April, Agustus dan Desember 2023
➤ Rapat Koordinasi Pengelolaan BMN	Juli 2023

1.4.2. Layanan Umum

Layanan umum direalisasikan sebanyak 1 layanan dalam komponen kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan urusan umum unit vertikal

Komponen Pelaksanaan urusan umum unit vertikal adalah aktivitas yang difungsikan untuk melaksanakan rapat kerja teknis, Koordinasi Kelembagaan dan Pelatihan Menembak.

Komponen ini dilaksanakan secara swakelola.

Adapun waktu pelaksanaan urusan umum unit vertikal adalah sebagai berikut :

Komponen/Sub Komponen	Waktu Pelaksanaan
➤ Rapat Kerja Teknis	Januari s/d Desember 2023
➤ Koordinasi Kelembagaan	Januari s/d Desember 2023
➤ Pelatihan Menembak	Maret dan Juni 2023

1.4.3. Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran direalisasikan sebanyak 12 layanan dalam komponen kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

Komponen Operasional dan Pemeliharaan Kantor adalah aktivitas yang difungsikan untuk pelaksanaan operasional dan pemeliharaan kantor berupa pemeliharaan gedung dan penataan ruang kantor, pemeliharaan mesin dan peralatan kantor, perawatan kendaraan dinas, langganan daya dan

jasa lainnya, honor tenaga kerja kontrak, Honor pengelola BMN, Honor Pejabat Pengadaan dan Pemeriksaan Barang dan Jasa, Pengelola Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB), Keperluan sehari-hari perkantoran, rekonsiliasi laporan BMN ke KPKNL dan dan Rekonsiliasi Laporan BMN ke Kanwil.

Komponen Operasional dan Pemeliharaan Kantor dilaksanakan secara dan swakelola.

Adapun waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut :

Komponen/Sub Komponen	Waktu Pelaksanaan
➤ Pemeliharaan Gedung dan Penataan Ruang Kantor	Januari s/d Desember 2023
➤ Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Kantor	Januari s/d Desember 2023
➤ Perawatan Kendaraan Dinas	Januari s/d Desember 2023
➤ Langganan Daya dan Jasa Lainnya	Januari s/d Desember 2023
➤ Tenaga Kerja Kontrak	Januari s/d Desember 2023
➤ Honor Pengelola BMN	Januari s/d Desember 2023
➤ Honor Pejabat Pengadaan dan Pemeriksaan Barang dan Jasa	Januari s/d Desember 2023
➤ Pengelola Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB)	Januari s/d Desember 2023
➤ Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Januari s/d Desember 2023
➤ Rekonsiliasi Laporan BMN ke KPKNL	Maret dan Juli 2023
➤ Sewa Rumah Dinas Kepala dan Gedung Kantor BNNK	Januari s/d Desember 2023
➤ Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 Kepala	Januari s/d Desember 2023

b. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang direalisasikan dalam bentuk Layanan Penyelenggaraan Kearsipan sebanyak 1 Dokumen, yaitu penataan arsip.

Komponen layanan penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan secara akuntabel dan swakelola. Adapun waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut :

Komponen/Sub Komponen	Waktu Pelaksanaan
➤ Penataan Arsip	Januari s/d Desember 2023

1.5. Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan

1.5.1 Layanan Dukungan Manajemen Internal

Kegiatan ini direalisasikan dalam 1 layanan yaitu Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi dan Unit dengan sub komponen kegiatan sebagai berikut :

➤ **Publikasi Informasi Kelembagaan Instansi Vertikal BNN**

Komponen publikasi informasi kelembagaan instansi vertikal BNN adalah aktivitas yang difungsikan untuk pelaksanaan publikasi informasi kelembagaan di Media Elektronik. Aktivitas dilaksanakan untuk seluruh kegiatan menonjol yang membutuhkan publikasi, bisa melalui media cetak, online dan radio.

Komponen/Sub Komponen	Waktu Pelaksanaan
➤ Press Realease	Juni 2023
➤ Kegiatan Kehumasan	Juni 2023
➤ Publikasi Kelembagaan	Juni 2023
➤ Pengadaan Bahan Informasi Kelembagaan	Juni 2023

B. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Program ini direalisasikan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing seksi di lingkungan BNNK Tanjung Jabung Timur. Adapun rincian kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)

Kegiatan yang dilaksanakan Seksi P2M BNNK Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1.1. Penyelenggaraan Advokasi

1.1.1 Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga

Pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba direalisasikan dalam sub komponen kegiatan sebagai berikut:

- Rapat koordinasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba.

Rapat koordinasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba dilaksanakan sesuai dengan jumlah sasaran target keluarga yang menjadi prioritas program ketahanan keluarga anti narkoba. Rapat koordinasi dilaksanakan 1 kali kegiatan, kegiatan rapat koordinasi dilaksanakan di Kantor BNNK Tanjung Jabung Timur, Narasumber sebanyak 2 Orang dari luar BNN dan jumlah peserta Rapat Koordinasi sebanyak 10 orang.

Dengan sasaran yaitu :

- Orang tua wali daerah Rawan Narkoba;

- Koordinasi Dalam Rangka pengayaan referensi advokasi P4GN ke BNNP.

Koordinasi Dalam Rangka pengayaan referensi advokasi P4GN ke BNNP dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Petugas koordinasi berjumlah 1 orang, dilaksanakan sebanyak 1 Kali di BNNP Jambi.

- Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.

Dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan mengundang keluarga yang akan diintervensi sebanyak 4 kali pertemuan dengan jumlah peserta 20 orang yang terdiri dari 10 keluarga yang terdiri dari 2 orang anggota keluarga (orang tua dan anak). Kegiatan dilaksanakan di

luar kantor BNNK Tanjung Jabung Timur dengan sewa ruang pertemuan.

1.1.2 Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa

- Koordinasi dalam rangka Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa.

Koordinasi dalam rangka Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai kebutuhan jumlah Desa/Kelurahan yang akan dilakukan Fasilitasi , termasuk koordinasi dengan stakeholder terkait.

- Rapat Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa, kegiatan tersebut dilaksanakan 1 kali dengan jumlah peserta 15 orang, kegiatan dilaksanakan diluar kantor BNN dengan sewa ruang pertemuan dan narasumber yang berasal dari luar BNN sebanyak 3 orang.

- Fasilitasi pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa.

dilakukan dalam bentuk pertemuan dengan mengundang perangkat Desa, Stakeholder terkait sebagai upaya penggunaan dana desa untuk program ketahanan keluarga. Jumlah peserta intervensi sebanyak 15 orang, kegiatan di laksanakan di luar kantor dengan sewa ruang pertemuan .

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa.

Kegiatan	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Rapat koordinasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba					√							
Koordinasi Dalam Rangka pengayaan referensi advokasi P4GN ke BNNP	√											
Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba						√	√					
Koordinasi dalam rangka Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	√											
Rapat Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa		√	√		√							
Fasilitasi pelaksanaan Advokasi Program												

Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa		√	√		√												
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa										√							

1.2. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat

1.2.1 Fasilitas dan Pembinaan Lembaga

Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta masyarakat direalisasikan dalam sub komponen kegiatan sebagai berikut:

➤ **Rakor Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba**

Dilaksanakan oleh bnnk kepada stakeholder dan pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba, peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari unsur pimpinan daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan panduan teknis kepada unsur pimpinan daerah untuk melaksanakan kebijakan Kabupaten/Kota tanggap ancaman narkoba.

➤ **Workshop Penggiat P4GN Instansi Pemerintah**

Dalam rangka memberikan pengetahuan mengenai P4GN kepada peserta agar dapat mensosialisasikan pengetahuan tersebut dan mengimplementasikan rencana aksi program P4GN pada Instansi/lingkungannya. Kegiatan dilaksanakan 1 hari dengan jumlah peserta 30 orang bersal dari level pejabat struktural/fungsional .

➤ **Pemberdayaan masyarakat anti narkoba melalui test urine di instansi pemerintah.**

Petugas pelaksanaan kegiatan sebanyak 7 orang.

➤ **Asistensi Kota/Kabupaten tanggap ancaman narkoba di Instansi Pemerintah.**

Bertujuan memberikan asistensi kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba dengan Jumlah Petugas 3 Orang.

➤ **Workshop penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mewujudkan kota tanggap ancaman narkoba pada sektor kewilayahan.**

Merupakan salah satu bentuk intervensi dalam aspek hukum melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam P4GN pada kebijakan kota tanggap ancaman narkoba. Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari dengan jumlah peserta 30 orang.

- Konsolidasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba pada sekto kelembagaan.

Merupakan salah satu bentuk penguatan kerja sama dan komitmen antara BNNK dan stakeholder terkait dalam memperkuat aspek kelembagaan dalam kebijakan kota tanggap ancaman narkoba. Kegiatan dilaksanakan 1 hari dengan jumlah peserta 30 orang.

- Monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Instansi Pemerintah.

Dilaksanakan dengan membagikan kuisisioner kepada sebanyak 10% dari jumlah penggiat P4GN yang dilatih. Petugas berjumlah 3 orang.

- Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Instansi Pemerintah.

Rapat dilaksanakan di kantor pada jam kerja.

- Pengumpulan data indeks kota/kabupaten tanggap ancaman narkoba.

Petugas berjumlah 3 orang.

- Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Lingkungan Swasta

- Workshop penggiat P4GN di Lingkungan Swasta

Dalam rangka memberikan pengetahuan mengenai P4GN kepada peserta agar dapat mensosialisasikan pengetahuan tersebut dan mengimplementasikan rencana aksi program P4GN pada Instansi/lingkungannya. Kegiatan dilaksanakan 1 hari dengan jumlah peserta 30 orang berasal dari level pejabat struktural/fungsional.

- Pemberdayaan masyarakat anti narkoba melalui test urine di lingkungan Swasta. Petugas berjumlah 5 orang.
- Asistensi Kota/Kabupaten tanggap ancaman narkoba di lingkungan swasta.
Bertujuan memberikan asistensi kepada Dunia Usaha Swasta untuk melaksanakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba di lingkungan swasta dengan Jumlah Petugas 3 Orang.
- Workshop penguatan kapasitas kepada insan media untuk mendukung kota tanggap ancaman narkoba.
Memberikan pengetahuan mengenai P4GN, Konseling serta publik speaking kepada peserta dari instansi/lingkungan agar dapat mensosialisasikan pengetahuan tersebut dan mengimplementasikan dengan membuat kegiatan P4GN di lingkungan tersebut. Kegiatan dilaksanakan 1 hari dengan peserta 30 orang, sasaran kegiatan ini adalah staf/pelaksanaan di perusahaan.
- Monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Lingkungan swasta.
Dilaksanakan dengan membagikan kuisioner kepada sebanyak 10% dari jumlah penggiat P4GN yang dilatih. Petugas berjumlah 3 orang.
- Pengumpulan data indeks kota/kabupaten tanggap ancaman narkoba lingkungan swasta.
Petugas berjumlah 3 orang.
- Rapat kerja program pemberdayaan masyarakat anti narkoba di lingkungan masyarakat.
Kegiatan dilaksanakan 1 hari dengan jumlah peserta 30 orang dari level pemangku jabatan/pengambil keputusan di lingkungan masyarakat.
- Workshop penggiat P4GN lingkungan masyarakat.
Dalam rangka memberikan pengetahuan mengenai P4GN kepada peserta agar dapat mensosialisasikan

pengetahuan tersebut dan mengimplementasikan rencana aksi program P4GN pada Instansi/lingkungannya. Kegiatan dilaksanakan 1 hari dengan jumlah peserta 30 orang bersal dari level pejabat struktural/fungsional.

- Pemberdayaan masyarakat anti narkoba melalui test urine di lingkungan masyarakat. Petugas berjumlah 3 orang.

- Pengembangan kapasitas P4GN pada lembaga adat dan komunitas berbasis kearifan lokal.

Penguatan kapasitas ini bertujuan untuk memaksimalkan lembaga adat/komunitas lokal dalam berperan serta dalam P4GN tentang P4GN.

- Monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Lingkungan masyarakat.

Dilaksanakan dengan membagikan kuisisioner kepada sebanyak 10% dari jumlah penggiat P4GN yang dilatih. Petugas berjumlah 3 orang.

- Pengumpulan data indeks Kota/Kabupaten tanggap ancaman narkoba lingkungan masyarakat.

Petugas berjumlah 3 orang.

- Rapat kerja program pemberdayaan masyarakat anti narkoba di lingkungan pendidikan.

Kegiatan dilaksanakan 1 hari dengan jumlah peserta 30 orang dari level pemangku jabatan/pengambil keputusan di lingkungan pendidikan.

- Workshop penggiat P4GN instansi pendidikan.

Dalam rangka memberikan pengetahuan mengenai P4GN kepada peserta agar dapat mensosialisasikan pengetahuan tersebut dan mengimplementasikan rencana aksi program P4GN pada Instansi/lingkungannya. Kegiatan dilaksanakan 1 hari dengan jumlah peserta 30 orang bersal dari mahasiswa akademisi di lingkungan pendidikan.

- Pemberdayaan masyarakat anti narkoba melalui test urine di lingkungan pendidikan. Petugas berjumlah 3 orang.
- Konsolidasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba pada lingkungan pendidikan.
Dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi kebijakan antara BNNK, Dinas Pendidikan, akademisi, tenaga pengajar, dan stakeholder terkait upaya memaksimalkan peran serta lingkungan pendidikan dalam P4GN. Kegiatan dilaksanakan 1 hari berjumlah 30 orang.
- Monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Lingkungan pendidikan.
Dilaksanakan dengan membagikan kuisisioner kepada sebanyak 10% dari jumlah penggiat P4GN yang dilatih petugas berjumlah 3 orang
- Pengumpulan data indeks Kota/Kabupaten tanggap ancaman narkoba lingkungan pendidikan.
Petugas berjumlah 3 orang

Adapun waktu pelaksanaan kegiatan adalah :

Kegiatan	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Rakor Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba			√									
Workshop Penggiat P4GN Instansi Pemerintah					√							
Asistensi Kota/Kabupaten tanggap ancaman narkoba di Instansi Pemerintah					√							
Workshop penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mewujudkan kota tanggap ancaman narkoba pada sektor						√						

kewilayahan.												
Konsolidasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba pada sektor kelembagaan.							√					
Monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Instansi Pemerintah									√			
Pengumpulan data indeks Kota/Kabupaten tanggap ancaman narkoba.											√	
Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Lingkungan Swasta							√					
Workshop penggiat P4GN di Lingkungan Swasta								√				
Asistensi Kota/Kabupaten tanggap ancaman narkoba di lingkungan swasta								√				
Workshop penguatan kapasitas kepada insan media untuk mendukung kota tanggap ancaman narkoba								√				
Monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Lingkungan swasta										√		
Pengumpulan data indeks kota/kabupaten tanggap ancaman narkoba lingkungan swasta.											√	
Rapat kerja program pemberdayaan								√				

masyarakat anti narkoba di lingkungan masyarakat													
Workshop penggiat P4GN lingkungan masyarakat									√				
Pengembangan kapasitas P4GN pada lembaga adat dan komunitas berbasis kearifan lokal.									√				
Monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Lingkungan masyarakat.										√			
Pengumpulan data indeks Kota/Kabupaten tanggap ancaman narkoba lingkungan masyarakat												√	
Rapat kerja program pemberdayaan masyarakat anti narkoba di lingkungan pendidikan									√				
Workshop penggiat P4GN instansi pendidikan.										√			
Konsolidasi kebijakan kota tanggap ancaman narkoba pada lingkungan pendidikan											√		
Monitoring pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Lingkungan pendidikan												√	

Pengumpulan data indeks Kota/Kabupaten tanggap ancaman narkoba lingkungan pendidikan.												√	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

1.3. Pengelolaan Informasi dan Edukasi

1.3.1. Fasilitasi dan pembinaan masyarakat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Dialog interaktif remaja
Kegiatan dilaksanakan 10 kali dengan jumlah peserta 10 orang.
- Informasi dan edukasi melalui insert konten
Kegiatan menempel pada even tertentu yang bersifat kolosal, seperti pentas seni sekolah.
- Informasi dan Edukasi melalui media luar ruang .
Produk media luar ruang meliputi baliho, spanduk, dan umbul-umbul. Lokasi berada di jalan nasional/provinsi yang strategis, masa tayang minimal 3 minggu atau selama giat berlangsung.

Adapun waktu pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Kegiatan	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dialog interaktif remaja	√	√	√		√	√						
Informasi dan edukasi melalui insert konten				√								
Informasi dan edukasi melalui media luar ruang				√								

2. Seksi Rehabilitasi

1. Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi

Kegiatan yang dilaksanakan Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1.1. Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/ atau Pecandu Narkoba

Direalisasikan dalam kegiatan sebagai berikut :

Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan

a. Pengukuran Kualitas Hidup

Pengukuran kualitas hidup menggunakan form WHOQool dilakukan sebanyak 2 kali untuk target 17 klien oleh petugas BNNK, bagi klien yang telah selesai mengikuti program rehabilitasi.

Komponen/Sub Komponen	Waktu Pelaksanaan
Pengukuran kualitas hidup	Maret dan Oktober 2023

1.2 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah

Direalisasikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- Standarisasi Profesi dan SDM

Layanan Standarisasi Profesi dan SDM Instansi Pemerintah melalui komponen kegiatan :

- Pelatihan Petugas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

Kegiatan ini dalam bentuk Bimbingan Teknis Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) berupa peningkatan kemampuan bagi peserta yang berasal dari unit IBM dibawah binaan BNNK. Jenis pelatihan yang dilakukan adalah screening, intervensi singkat dan konseling dasar. Dilaksanakan 1(satu) kali selama 3 (tiga) hari di kantor BNNK Tanjung Jabung Timur.

➤ **Monitoring Petugas Rehabilitasi**

Kegiatan ini dalam bentuk monitoring rencana aksi berupa kunjungan ke unit IBM dibawah binaan BNNK untuk memantau pelaksanaan atau hasil dari rencana aksi yang disusun oleh petugas IBM yang sudah diberikan peningkatan kompetensi. Dilaksanakan 1 kali di 2 lembaga IBM.

Komponen/Sub Komponen	Waktu Pelaksanaan
Bimbingan Teknis Petugas IBM	Maret 2023
Monitoring Rencana Aksi	Mei 2023

1.3 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat

Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat direalisasikan dalam rangka :

➤ **Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota**

a. **Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota**
Operasional Klinik merupakan pengadaan kebutuhan selama pelayanan klinik pratama berjalan mencakup Penggandaan, rekam medis, ATK, komputer supplis, langganan internet SIRENA dan Transport dalam kota bagi 2 (dua) orang petugas SIL yang dilaksanakan 4 kali selama 10 bulan.

b. **Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan**

Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan merupakan pengadaan kebutuhan layanan dan Jasa Layanan Rawat jalan di klinik Pratama mencakup obat – obatan dan 1 kali pemeriksaan kesehatan bagi 35 (tiga puluh lima) orang Klien, belanja Test Urine, Jasa konseling, asesmen dan biaya skrining dan intervensi lapangan.

c. **Pendampingan dan Pemulihan**

Pendampingan dan Pemulihan merupakan pengadaan kebutuhan layanan selama program IBM berjalan mencakup belanja persediaan alat test urine sebanyak 40 pcs untuk 20 klien

program IBM 2 kali pemeriksaan dan jasa evaluasi WHOQoL dilaksanakan 2 Kali pada 20 klien program IBM.

Komponen/ sub komponen	Waktu pelaksanaan
Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNK/ Kota	Januari s/d Desember 2023
Layanan klinik pratama	Januari s/d Desember 2023
Pendampingan dan Pemulihan	Juni s/d November 2023

➤ Layanan IBM

a. Penerimaan Awal

Penerimaan awal merupakan tahap awal pelaksanaan layanan IBM (skrining) oleh petugas Agen Pemulihan dilakukan sesuai jumlah target klien.

b. Layanan Wajib

Layanan wajib terdiri dari kunjungan diri, keterampilan hidup dan KIE. Kunjungan diri dilakukan di lokasi klien secara individual. Keterampilan hidup dan KIE dilakukan secara kelompok dengan minimal 5 orang klien. Layanan wajib ini dilakukan oleh petugas AP.

c. Layanan Pilihan

Layanan pilihan terdiri dari Kelompok dukungan sebaya, pencegahan kekambuhan dan rujukan. Kelompok dukungan sebaya sebanyak 2 kali dengan minimal peserta 5 orang klien. Pencegahan kekambuhan dilakukan sebanyak 2 kali dengan petugas AP. Rujukan dilakukan apabila ada klien dengan kategori pecandu berat dilakukan maksimal 5 kali oleh petugas AP.

d. Bina Lanjut

Bina lanjut merupakan tahap akhir pelaksanaan layanan IBM berupa pemantauan dan pengembangan diri dilakukan sebanyak 2 kali oleh petugas AP.

Komponen/ Sub komponen	Waktu pelaksanaan
Penerimaan Awal	Juni s/d November 2023
Layanan Wajib	Oktober dan November 2023
Layanan Pilihan	Oktober dan November 2023
Bina lanjut	Oktober dan November 2023

➤ Layanan SKHPN

Layanan SKHPN merupakan pengadaan kebutuhan layanan SKHPN mencakup ATK dan Komputer Supplies, belanja persediaan alat test urine sebanyak 90 pcs dan jasa pemeriksaan kesehatan dan UT zat untuk 90 orang layanan SKHPN.

Komponen/ Sub komponen	Waktu pelaksanaan
Layanan SKHPN	Januari s/d Desember 2023

Fasilitas dan Pembinaan Lembaga

a. Bimbingan Teknis Fasilitas Rehabilitasi

Kegiatan ini dalam bentuk Bimbingan Teknis oleh staff BNNK ke Lembaga Instansi Pemerintah dibawah binaan BNNK Tanjung Jabung Timur. Dilaksanakan oleh 2 (dua) orang Petugas BNNK dilakukan 1 (satu) kali pada 2 (dua) Lembaga .

b. Rapat Koordinasi IBM

Rapat koordinasi IBM dilakukan antar instansi yang dimaksudkan untuk berkoordinasi tentang pelaksanaan program rehabilitasi mengenai Intervensi Berbasis Masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota. Peserta rapat berasal dari BNNK/Kota, dan Instansi Terkait tingkat Kabupaten. Peserta berjumlah 15 orang yang berasal dari bidang Rehabilitasi BNNP, Pemangku Kepentingan di lokasi cikal bakal IBM, tokoh masyarakat setempat, dan petugas instansi terkait. Adapun hal yang dibahas adalah permasalahan rehabilitasi Narkoba di IBM tingkat Kabupaten/Kota. Dilaksanakan 1 kali dalam setahun di 1 Lokasi yang ditunjuk mengenai pelaksanaan IBM. Dilakukan oleh 5 orang petugas pada IBM kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan

satu kali kegiatan dan 5 orang petugas pada IBM yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan sasaran sebanyak 1 lokasi.

c. Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Rehabilitasi

Merupakan kegiatan monitoring Fasilitas Rehabilitasi di laksanakan pada 2 lembaga Instansi Pemerintah oleh 2 orang petugas BNNK diberi transport dalam kota

Komponen/ Sub komponen	Waktu pelaksanaan
Bimtek Lembaga Rehabilitasi	Maret 2023
Rapat Koordinasi Tingkat kabupaten/ Kota	Februari 2023
Monev	Juni 2023

Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk

a. Pembentukan Unit IBM

Pembentukan unit IBM dimulai dengan melakukan rapat pembentukan yang dilaksanakan satu kali di lokasi program IBM. Peserta rapat berjumlah 15 orang selama satu kali kegiatan pada 1 lokasi. Dilakukan oleh 5 orang petugas selama 1 kali kegiatan di 1 lokasi yang sama, dan diberikan biaya transport lokal kepada 5 orang petugas selama satu kali kegiatan di 1 lokasi.

b. Supervisi dan Asistensi

Asistensi dilakukan oleh petugas BNNK untuk memberikan bimbingan dalam pelaksanaan program IBM saat program tersebut tengah berjalan. Dilakukan oleh dua orang staff BNNP sebanyak 4 kali selama pelaksanaan program IBM. Kepada petugas diberikan biaya transport dalam kota.

c. Evaluasi Unit IBM

Evaluasi unit IBM dilakukan untuk mengevaluasi unit IBM oleh seksi rehabilitasi BNNK/ Kota sebanyak 1 kali.

d. Operasional Unit IBM

Operasional Unit IBM merupakan pengadaan kebutuhan pelayanan selama program IBM berjalan mencakup ATK dan *computer supplies*, buku

raport pemulihan, penggandaan dan konsumsi rapat yang tersedia untuk 15 orang petugas selama 5 kali pelaksanaan di 1 lokasi IBM. Operasional unit IBM ini berupa pelaksanaan rapat anggota Tim IBM. Rapat dilakukan oleh peserta rapat sebanyak 15 orang, dilaksanakan selama 5 kali di 1 lokasi IBM.

Komponen/ Sub komponen	Waktu pelaksanaan
Pembentukan Unit IBM	Februari 2023
Supervisi dan Asistensi	Juni s/d September 2023
Evaluasi Unit IBM	Oktober 2023
Operasional Unit IBM	Mei 2023

3. Seksi Pemberantasan

3.1. Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU yaitu sebagai berikut :

- Komponen Penyelenggaraan Asesmen Terpadu bagi Penyalahguna Narkoba meliputi kegiatan Administrasi Tahanan direalisasikan dalam rangka pembelian ATK dan komputer supplies untuk pembuatan laporan bulanan tahanan, Case Conference sebanyak 3x, honor Tim TAT dan biaya transport perjalanan dinas tim TAT sebanyak 3x.

3.2. Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Perkara Hukum Perseorangan yang meliputi berkas perkara tindak pidana narkoba dengan komponen sebagai berikut :

➤ **Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkoba**

Komponen kegiatan Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Narkoba direalisasikan untuk belanja bahan berupa pengadaan ATK, komputer supplies, penggandaan,

dukungan operasional penyelidikan, perjalanan dinas penyelidikan di luar kota dan belanja perjalanan dinas dalam kota.

Komponen kegiatan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika direalisasikan untuk belanja bahan pengadaan ATK dan komputer supplies, penggandaan berkas perkara, dukungan operasional penyidikan, perjalanan dinas dalam rangka mengurus tap status, P-21 dan menghadiri sidang serta untuk dukungan perjalanan dinas dalam kota.

C. KEGIATAN NON-DIPA

Pada tahun 2023, BNNK Tanjung Jabung Timur telah merencanakan kegiatan Non-DIPA sebagai berikut :

NO	BAGIAN / BIDANG	RENCANA KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Subbag Umum	a. Koordinasi dalam rangka menuju Zona Integritas	Minggu I Maret 2023
		b. Sosialisasi Keprotokolan kepada pegawai BNNK dan jajaran	Minggu IV Maret 2023
		c. Internalisasi Nilai-Nilai BNN kepada pegawai BNNK dan jajaran	Minggu IV Maret 2023
2.	Seksi P2M	Koordinasi dengan Instansi Terkait di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Januari 2023
		Mou dengan Instansi Terkait	Februari – Desember 2023
		Sosialisasi P4GN	Februari – Desember 2023
		Membuat Himbauan Layanan Masyarakat	Maret – Desember 2023
3.	Seksi Rehabilitasi	a. Koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan program rehabilitasi	Februari 2023
		b. Melakukan penjangkauan di sekolah dan daerah rawan kepada penyalahguna Narkoba	Februari – November 2023
		c. Koordinasi ke lembaga-lembaga yang akan dijadikan tempat rehabilitasi Narkoba (RS dan Puskesmas)	Februari – Juni 2023
		d. Bekerjasama dalam pelaksanaan P4GN khususnya rehabilitasi dengan organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang pemberantasan Narkoba	Februari – Desember 2023

		e. Membuat surat edaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar menghimbau kepada Direktur Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas untuk membuat spanduk/banner di setiap Rumah Sakit dan Puskesmas yang melaksanakan program rehabilitasi rawat jalan	Januari 2023
		f. Koordinasi ke Kecamatan / Kelurahan	Januari 2023
		g. Koordinasi ke Babinsa dan Babinkamtibmas Kecamatan	Februari 2023
4.	Seksi Pemberantasan	Koordinasi instansi terkait mengenai pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Januari – Desember 2023

BAB III

KEGIATAN DAN ANGGARAN

Anggaran untuk mendukung program dan kegiatan BNNK Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2023 sesuai dengan DIPA BNNK Tanjung Jabung Timur nomor : SP DIPA-066.01.2.419203/2023 tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp. 1. 803.733.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen	<u>Rp. 1.042.003.000,-</u>
a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan (3236)	Rp. 108.492.000,-
- Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 91.092.000,-
- Layanan Manajemen Internal	Rp.17.400.000,-
b. Pengembangan Organisasi, Tata Laksana dan Sumber Daya Manusia (3237)	
- Layanan Manajemen SDM	Rp. 19.596.000,-
c. Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN (3238)	
- Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 29.380.000,-
d. Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana (3239)	Rp. 1.038.973.000,-
- Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 1.035.973.000,-
- Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Rp. 3.000.000,-
e. Penyelenggaraan Humas dan Protokol (3979)	
- Layanan Humas dan Informasi	Rp. 20.000.000,-

<p>2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) :</p>	<p><u>Rp. 592.748.000,-</u></p>
<p>a. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Advokasi - Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat - Pengelolaan Informasi dan Edukasi 	<p><u>Rp. 348.065.000,-</u></p> <p>Rp. 100.000.000,-</p> <p>Rp. 184.065.000,-</p> <p>Rp. 64.000.000,-</p>
<p>b. Seksi Rehabilitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba - Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah - Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat 	<p><u>Rp. 147.336.000,-</u></p> <p>Rp. 16.260.000,-</p> <p>Rp. 10.325.000,-</p> <p>Rp. 120.751.000,-</p>
<p>c. Seksi Pemberantasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti - Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika 	<p><u>Rp. 111.775.000,-</u></p> <p>Rp. 11.775.000,-</p> <p>Rp. 100.000.000,-</p>

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Kerja BNNK Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023 ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2023. Rencana Kerja ini meliputi :

- a. Kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Anggaran yang dibutuhkan dalam tiap kegiatan.
- c. Jadwal pelaksanaan kegiatan.

B. Saran

- a. Diharapkan semua bidang melaksanakan kegiatan sesuai dengan timeline yang telah dibuat.
- b. Membuat laporan kegiatan secara tertulis dan laporan lisan/wa grup kepada Pimpinan.
- c. Melakukan inovasi-inovasi terbaru dalam meningkatkan peran BNN dimasyarakat melalui kegiatan Non Dipa.
- d. Melakukan koordinasi-koordinasi dengan instansi terkait baik pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan P4GN.
- e. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan Dipa maupun Non Dipa agar pelaksanaan kegiatan berikutnya lebih baik lagi.